

DESKRIPSI HKI

Karya ini merupakan kajian hukum mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kajian berfokus pada penerapan ketentuan perizinan pertambangan serta efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum yang jelas melalui kewajiban perizinan, larangan pertambangan tanpa izin, serta pengaturan sanksi administratif dan pidana. Namun, penerapannya di Kabupaten Ponorogo masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan, sumber daya aparatur, kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi terhadap kegiatan pertambangan. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan, koordinasi penegak hukum, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi alternatif untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

HS, Salim. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

